

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM
RANGKA PENATAAN KOTA SIMPANG TIGA
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh:

JEFRY RINALDI ANHAR
NPM. 1403100017

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **JEFRY RINALDI ANHAR**
N P M : 1403100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM RANGKA PENATAAN KOTA SIMPANG TIGA DI KABUPATEN BENER MERIAH

Medan, 12 Oktober 2018

PEMBIMBING


DR. MOHD YUSRI, M.SI
Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **JEFRY RINALDI ANHAR**
N P M : 1403100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 18 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DRS.R.KUSNADI,M.AP.** (.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN,S.SOS,MH** (.....)

PENGUJI III : **DR.MOHD.YUSRI,M.SI** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya JEFRY RINALDI ANHAR, NPM 1403100017, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan



JEFRY RINALDI ANHAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **JEFFY RINALDI ANHAR**
 NPM : **1403100017**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Judul Skripsi : **Implementasi' Gamun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTKRW) Dalam rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	4 Juni 18	Bimbingan perbaikan proposal dari bab I sampai bab III	
2	7-06-2018	Perbaikan latar belakang Masalah	
3	12-06-2018	Perbaikan penulisan	
4	15-06-2018	Bimbingan daftar wawancara	
5	20-06-2018	ACC daftar wawancara	
6	28-06-2018	Perbaikan bab -IV	
7	9-10-2018	Perbaikan kesimpulan dan abstrak	
8	12-10-18	ACC skripsi	

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. ANSAR SALEH - S.SOS.MSP)

Ketua Program Studi,

(NAILI - KHARIFAH - SIP.MPD)

Pembimbing ke :

(PIS - MOHD. YUSRI)

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM RANGKA PENATAAN KOTA SIMPANG TIGA
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**JEFRY RINALDI ANHAR
NPM:1403100017**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten ini merupakan kabupaten baru pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah. Sebagai kabupaten baru tentunya kabupaten ini memiliki permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang, skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah tersebut serta mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam menyelenggarakan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dituangkan dalam Qanun No. 13 tahun 2013, qanun ini masih didasari UU No. 24 1992 yang seharusnya telah diganti dengan UU no. 26 tahun 2007. hal ini merupakan satu kelemahan dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Bener Meriah. Selain itu kabupaten Bener Meriah belum lengkap memiliki instansi-instansi pemerintahan yang berwenang melaksanakan penataan ruang. Selain itu ada beberapa faktor penghambat lainnya misalnya kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat dijelaskan dalam skripsi ini. Pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam perannya melaksanakan penataan ruang juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan tindakan agar pelaksanaan penataan ruang dapat berjalan dengan baik, serta untuk memecahkan permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penataan ruang. Termasuk pula peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota simpang tiga di Kabupaten Bener Meriah belum efektif, karena ditemukan kendala-kendala yang terkait masih adanya ketidak sesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi yang dimiliki pihak-pihak pelaksana pembangunan infrastruktur, hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan infrastruktur bahwa masih ada beberapa pihak yang kurang memahami tugasnya dan kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam menunjang tugasnya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah rabbil 'alamin atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul "Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah".

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalamam yang penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermafaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang utama kepada Ayahanda **Alm. Khairil Anshar** tersayang dan **Alm. Rahmani** tercinta, yang telah menjadi acuan penulis selama ini.

2. Abang **Ricky Herwahyu Anhar,Se** dan adik **Harry Alfaridzi Anhar** serta adik perempuan **Askana Shaqy Khairisa** yang menjadi motifasi penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi
3. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak **Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.SP** selaku pelaksana Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Ibu **Nalil Khairiah S.Sos, M,Pd** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak **Drs. Mohd Yusri** selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberi arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi
7. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama Penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak **Alfahmi,St**, selaku Plt. Kepala dinas pekerjaan umum, Perumahan Dan Kawasan pemukiman Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis perlukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
9. Para narasumber lainnya yang disertakan didalam penelitian ini yaitu Bapak Wildan Seni,St, Bapak Anhar Adly, Bapak Ali Hasan,St, bapak Rusydan,ST yang telah menjawab pertanyaan yang penulis berikan.

10. Sahabat-sahabat **Mhd dzul, Angga putra, Mhd ekal, Intan pusoita, Nadya aisyah, Shelly novia** dan **Vivi Ariska** telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

11. Seluruh teman-teman Mahasiswa/I Ilmu Administrasi Negara Stambuk 2014.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

Medan, Oktober 2018

Jefry Rinaldi Anhar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan	9
B. Model-model kebijakan	10
C. Pengertian Kebijakan public	16
D. Proses Pembuatan Kebijakan Publik	12
E. Jenis Kebijakan Secara Umum	19
F. Ciri Ciri Kebijakan Publik	19
G. Tahap Tahap Kebijakan Publik.....	20
H. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatana Kebijakan.....	22
I. Pengertian Tata Ruang Wilayah.....	24
J. Fungsi Dan Kedudukan Rtrw Kabupaten	25
K. Muatan, Fungsi, Dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Kerangka Konsep.....	29
C. Definisi Konsep.....	30
D. Kategorisasi.....	31
E. Narasumber.....	32

F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	46
C. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Kerangka Konsep.....	29
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang-ruang kota yang ditata terkait dan saling berkesinambungan ini mempunyai berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pembangunannya. Tata guna lahan, sistem transportasi, dan sistem jaringan utilitas merupakan tiga faktor utama dalam menata ruang kota. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya.

Perencanaan kota dapat diartikan sebagai perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasian lahan dalam berbagai macam fungsi dan kegiatan (Hariyono 2010). Salah satu bentuknya adalah perencanaan penggunaan lahan (*Land use planning*). Dalam tata ruang dan perencanaan daerah biasanya memiliki jangka waktu dan diperbaharui setiap 20 tahun sekali, dimana dalam jangka waktu tersebut perlu dilakukan review-review dan penyesuaian kembali terutama daerah yang mengalami perkembangan pesat. Review ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penyimpangannya dimana dalam hal ini adalah penyimpangan penggunaan lahan yang telah ditetapkan pada rencana tata ruang.

Proses perubahan penggunaan lahan akan berlangsung terus menerus

sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat setempat. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang, baik itu sebagai tempat tinggal maupun untuk fungsi lain, sehingga penggunaan lahan yang tidak terencana akan menimbulkan dampak kerusakan dimasa mendatang. Perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan yang menghasilkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan, tentang alternatif dan penggunaan sumber daya yang memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Hariyono 2010). Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu kegiatan perencanaan dan pengawasan yang baik dan efisien agar pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah dapat terarah sesuai dengan yang direncanakan sehingga mencapai hasil yang optimal dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Salah satunya adalah tentang tam ruang wilayah perkotaan. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak alum berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan seen berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti yang kite ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang

terjadi di daerah kabupaten Bener Meriah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan social. Ini dikarenakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah.

Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat ada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button. 2002 dalam Had Wahyono,2006), namun kenyatannya pada saat ini belum tersedianya insfrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik peningkatan intensitas kegiatan peningkatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sangat mengancam kelestarian lingkungan (termasuk pemanasan global)maka dari itu penyelenggaraan tata ruang wilayah sangat diperlukan.

Menurut Catanesey, Anthony J.. dan Jamse C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat. Pola pertumbuhan dan prospek

perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan saran lingkungannya yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Masalah-masalah tersebut menambah kacaunnya keadaan tata kota yang dari infrastrukturnya masih belum baik. Dan pernyataan di atas pemerintah memang mempunyai tanggung jawab besar terhadap masalah perencanaan tata kota yang masih kacau tersebut. Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, setiap pemerintah kota memerlukan upaya pemantauan terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Karena akibat kurang matangnya perencanaan tata ruang dan inkonsistensi pemerintah berdampak kurang terkendalinya pergerakan masyarakat entah itu masalah urbanisasi, membludaknya kendaraan bermotor pribadi atau dampak lain masalah tata kota. Tetapi di sini tidak hanya menjadi masalah pemerintah tetapi sudah menjadi masalah kota tersebut menyangkut semua yang ada di dalamnya termasuk penduduk yang bertempat tinggal. Pemerintah hanyalah sebagai perwakilan yang masyarakat percaya sebagai yang dituakan atau pemberi fasilitas dan pembangun situasi dan kondisi di masyarakat. Sedang subyek yang sesungguhnya adalah masyarakat yang bertempat tinggal. masalah tersebut. Oleh karena itu harus terjadi kerja sama

yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : "Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. maka perumusan masalah pencliti ini adalah bagaimana Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana I ata Ruang Wilayah (Rt/rw) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Qanun Nornor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/rw) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah selaagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan Kota Simpang Tiga
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur

dalam rangka Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan Kota Simpang Tiga.

- c. Peneliti ini diharapkan dapat menamhah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

Menurut Budiman (1991: 446) Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat diukur apa-apa saja yang telah dikerjakan.

Menurut Grindle (1980 : 07) Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Kebijakan, Kebijakan Publik,Aspek-Aspek Kebijakan, Pengertian Tata Ruang, Fungsi Dan Kedudukan .

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data dan

Analisis Data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan hohot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Friedrich (2008:7) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan diatas, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditetapkan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan di laksanakan.

2.. Model-Model Studi Kebijakan.

A. Model-Model Studi Kebijakan

1. Pengertian Model Kebijakan

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artificial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.

Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi

masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik. Model pesawat terbang, model pakaian, model rumah dibuat untuk menggambarkan bentuk asli dari benda yang ingin digambarkannya. Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya.

2. Fungsi Model Kebijakan

Fungsi utama model adalah untuk mempermudah kita menerangkan suatu benda atau konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat didasarkan suatu teori, tetapi model juga dapat dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Untuk mempermudah dalam menjelaskan gedung, pasar, pemerintah, partisipasi, atau kesejahteraan tentunya diperlukan model, benda dan konsep di atas tidak mungkin kita bawa kemana-mana. Kita hanya dapat membawa benda dan konsep tersebut dalam bentuk model. Oleh karena itu, model memiliki fungsi :

A .Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasinya sistem alamiah atau system buatan manusia. Model membantu kita menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi.

B. Membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan.

C. Membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut.

D .Membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakekat hubungan antar elemen.

3.Model-Model Studi Kebijakan

Ada beberapa model studi kebijakan menurut James Anderson, James P.Lester dan Joseph Stewart, masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan. Model-model tersebut adalah :

A.Model Pluralis

Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah.Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik.Tugas sistem politik adalah untuk mengelola konflik kelompok. Tindakannya berupa :

- 1) Menentukan aturan permainan dalam perjuangan kelompok.
- 2) Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan publik.
- 3) Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan.
- 4) Memperkuat kompromi-kompromi.

Model pluralis memiliki keunggulan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada kepentingan kelompok dan tidak atas dasar kepentingan pribadi. Kelemahan pada model ini adalah apabila kelompok tersebut tidak memikirkan kepentingan kelompok lain, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.

B. Model Elitis

Dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.

Model elitis memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak menyita banyak waktu bisa dikatakan bahwa model elitis memiliki efektifitas waktu, mengingat dalam pengambilan kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok elit dan tidak terlalu banyak melibatkan pribadi atau kelompok lain. Adapun kelemahan model elitis adalah apabila kelompok elit yang mengambil kebijakan hanya didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan public, itu artinya kebijakan yang diambil menurut kelompok elite merupakan kebijakan terbaik akan tetapi bagi publik justru malah menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

D. Model Sistem

Model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem (policy as system output). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran (*output*) dari sistem politik.

Model sistem dilihat dari proses pengambilan kebijakan, lebih baik dibandingkan dua model terdahulu, mengingat dalam model sistem ini pengambilan kebijakan merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik, yang mana dasar-dasar pengambilan kebijaksanaan tentunya akan lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada.

D. Model Rasional

Model ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan satu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.

e. Model Inskrementalis

Memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Penyaji model : Charles E. Lobdloom sebagai kritik pembuatan

keputusan tradisional – rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada. Pada umumnya para pembuat kebijakan, menerima legitimasi program yang telah ditetapkan dan secara diam-diam setuju untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Dalam model ini memiliki kelebihan apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sebelumnya merupakan sebuah kebijakan yang tepat maka model ini tidak akan menimbulkan konflik dan juga efektif dilihat dari waktu serta anggaran. Akan tetapi apabila pengambil kebijakan sebelumnya salah dalam mengambil kebijakan dan pengambil kebijakan selanjutnya menggunakan model ini maka akan muncul permasalahan yang kompleks.

f. Model Institusional

Menurut Islami (1997) model ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan

pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

Hubungan antara kebijakan public dan lembaga-lembaga pemerintah adalah amat erat. Dikatakan suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum diangkat, dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga pemerintah.

Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan publik 3 karakteristik yang berbeda :

- (1) Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.
- (2) Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.
- (3) Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Leo (2008:7) Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan "kesulitan-kesulitan" dan kemungkinan-kemungkinan "kesempatan-kesempatan" dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut William (2003:132) Kebijakan Publik "Publik adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

David Easton (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "the authoritative allocation of values for the whole society". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Dalam pelaksanaan kebijakan publik.

4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni:

- 1) perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *penyusunan agenda (agenda setting)*. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
- 2) peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap *formulasi kebijakan*. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau disulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan;

3) rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *adopsi* kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalisasi dan akibat ganda. Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4) pemantauan. Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*.

5) evaluasi. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap *penilaian kebijakan* terhadap proses

pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan. membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

5. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2006 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 1) kebijakan umum. yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 2) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; 3) kebijakan teknis. kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

6 .Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda dapat mengacu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik yakni :

- 1) kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
- 2) kebijakan Publik dilakukan oleh seorang actor.
- 3) kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah.
- 4) kebijakan Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya.

5) kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah contohnya Undang Undang,

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah .

- 1) kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan.
- 2) kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidangbidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- 4) kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

7. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-Tahap Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winamo (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi

catatan catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini, Tahap-Tahap Kebijakan Penyusunan kebijakan Formulasi kebijakan Adopsi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Bud' Winamo (2007: 32-34).

8 .Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan

atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator. meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik. karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti. terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan social dari para pembuat

keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain.: 2)

B. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. RTRW kabupaten merupakan penjabaran dari R'IRW provinsi ke dalam tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikemhangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dihutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan clang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang. demikian yang dimaksud dalam Bab 1 Pasal 1(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Sehingga RTRW seharusnya menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan

perekonomian lokal.

Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan menggunakan instrumen perizinan pembangunan.

2. Fungsi Dan Kedudukan Rtrw Kabupaten

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten pedoman bagi pelaksanaan

perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bener Meriah sampai pada RDTR Kabupaten; Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/ Kawasan Strategis, RTBI. Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Bener Meriah.

3. Muatan, Fungsi, dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- penetapan kawasan strategis kabupaten;
- arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector.
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

BAB 3

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber.

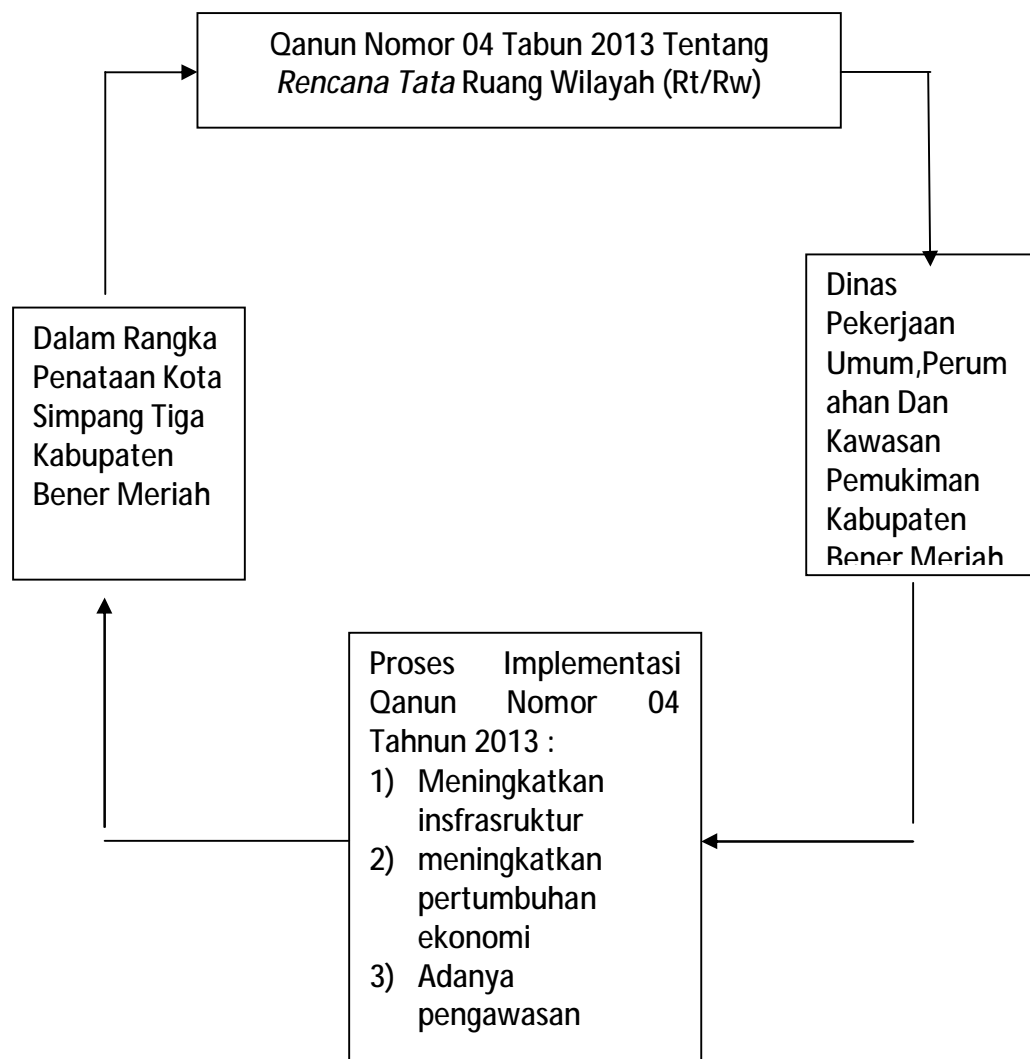
Menurut Suhyantoro (2006: 75) penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi, memperbandingkan dan sebagainya sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat deduktif.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan. tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstraks yang terbentuk oleh generasi dari hal-hal khusus, oleh karena konsep merupakan abstraks maka konsep tidak dapat langsung di amati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variabel adalah dimana simbol atau garis yang menunjukan nilai atau bilangan konsepnya.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teed, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



3. Definisi konsep

Definisi konsep menurut Soedjadi (2000 :14) adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan istilah atau rangkaian kata. Konsep berhubungan erat dengan definisi. Dengan adanya definisi, orang dapat membuat ilustrasi atau gambaran atau lambang dari konsep yang didefinisikan sehingga menjadi jelas apa maksud konsep tertentu.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kebijakan merupakan hakekat studi tentang policy (kebijakan) mencakup tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan. strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
3. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Dalam pelaksanaan kebijakan publik.

4. Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
5. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negative.
6. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian.

1. Adanya pembangunan infrastruktur sebagai suatu usaha pertumbuhan

dan perubahan daerah.

2. Adanya pemanfaatan sumber daya, sara dan prasarana dalam jumlah tertentu.
3. Adanya pengawasan dalam menetapkan ukuran kinerja.
4. Adanya pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

5. Narasumber

Untuk Melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, Maka dalam penelitian ini pencliti menggunakan individu sehagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) Dalam Rangka Penataan Kota Di Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah yang diharapkan informasinya dapat dijadikan data.

1. Alfahmi,St (Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Bener Meriah).
2. Ali Hasan,ST (Bidang Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah)
3. Rusydan,ST (Seksi Perencanaan Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah)
4. Padlianto , Setiadi Miranda dan Reza Ariski (Masyarakat Simpang 3 Bener Meriah).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara. Menurut Ali (1997 : 152), wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber

a) Wawancara

Menurut Prabowo (1996) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan situs Internet yang dapat dipercaya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan

fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/rw) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah.

8. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Moleong (2004 :86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Jl. Takengon-Pondok baru (komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah)

G. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.

1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah.

a. Visi

“Bener Meriah Yang Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera”

b. Misi

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi

3. Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkeadilan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Dan Perkebunan Yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing
6. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Optimal Bagi Masyarakat
7. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Harmonis
8. Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat, Mandiri dan Berkeadilan

2. Sejarah Kabupaten Bener Meriah.

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia.

Sejarah

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.

Etimologi

No	Nama Kecamatan ^[5]	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------------	--------------	--------------------

Kata Bener berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti ramai/sejahtera (gemah ripah), jadi Bener Meriah memiliki arti Bandar (kota) yang ramai/sejahtera, namun Bener Meriah juga sering dikaitkan dengan anak Raja Linge.

Penduduk

Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Hasil Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2012 berjumlah 148.616 jiwa yang terdiri atas 75.958 dan 72.658 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bandar yakni berjumlah 25.509 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di kecamatan Syiah Utama yang berjumlah 3.337 jiwa. Dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

1	Pintu Rime Gayo	6.902	6.451	13.353	223,56 km ²	59,73 jiwa/km ²
2	Permata	9.440	8.830	18.270	159,66 km ²	114,43 jiwa/km ²
3	Syiah Utama	1.710	1.627	3.337	792,71 km ²	4,21 jiwa/km ²
4	Bandar	12.859	12.650	25.509	88,10 km ²	289,55 jiwa/km ²
5	Bukit	12.802	12.536	25.338	110,95 km ²	228,37 jiwa/km ²
6	Wih Pesam	11.951	11.427	23.378	66,28 km ²	352,72 jiwa/km ²
7	Timang Gajah	10.264	9.862	20.126	98,28 km ²	204,78 jiwa/km ²
8	Bener Kelipah	2.379	2.285	4.664	19,75 km ²	236,15 jiwa/km ²
9	Mesidah	2.802	2.435	5.237	286,83 km ²	18,25 jiwa/km ²
10	Gajah Putih	4.849	4.555	9.404	73,57 km ²	127,82 jiwa/km ²

Geografi

Bener Meriah terletak 4° 33 50 - 4° 54 50 Lintang Utara dan 96° 40 75- 97° 17 50

Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 - 2.500 .

Perekonomian

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan jasa.

Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, kopi gayo, kelapa, Nilam dan hampir segala jenis tanaman horticultura tumbuh subur di sepanjang wilayah kabupaten Bener

Meriah seperti cabe, kentang, kubis dan sayuran. sub sektor jasa Pariwisata yaitu wisata alam dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 bandar udara yaitu, bandar udara rembele.

3. Visi Dan Misi Kabupaten Bener Meriah

Visi

"BENER MERIAH YANG ISLAMI, HARMONI, MAJU DAN SEJAHTERA"

Misi

Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah.

Mewujudkan Pelayanan Prima Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi.

Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkeadilan.

Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Dan Perkebunan Yang Berkeadilan.

Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Optimal Bagi Masyarakat.

Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Harmonis.

Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat, Mandiri Dan Berkeadilan.

Untuk mengetahui dasar perumusan perencanaan kabupaten Bener Meriah dalam penataan ruang maka perlulah diketahui Visi dan Misi pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Visi daerah adalah merupakan penjabaran dari cita-cita nasional seperti yang diutarakan dalam mukaddimah pembukaan UUD 1945 yaitu untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan daerah menetapkan visi pembangunan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah agribisnis yang didukung oleh pertanian yang tangguh, berdaya saing dan kompetitif".

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1.Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, mandiri dan berwawasan lingkungan.
- 2.Mewujudkan terlaksanannya syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan ummat.
- 3.Mewujudkan pelaksanaan keistimewaan Aceh secara menyeluruh.
- 4.Meningkatkan kualitas sumber daya insani yang akhlakul qarimah, beriman, bertaqwa dan menguasai iptek melalui peningkatan mutu pendidikan yang dapat terjangkau dan pelayanan peningkatan kualitas kesehatan.
- 5.mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah.
- 6.Mengupayakan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat sebagai prasyarat terlaksananya aspek pembangunan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 terdapat beberapa bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk

dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan dan kemampuan pembiayaan daerah dan hal-hal yang disebutkan di bawah ini adalah yang berhubungan dengan penataan ruang yaitu :

1. Bidang administrasi Umum Pemerintahan Di dalam bidang ini yang berkaitan dengan tata ruang adalah perumusan penyediaan data yang akurat untuk mendukung dan menunjang perencanaan serta terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Kemudian mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan.

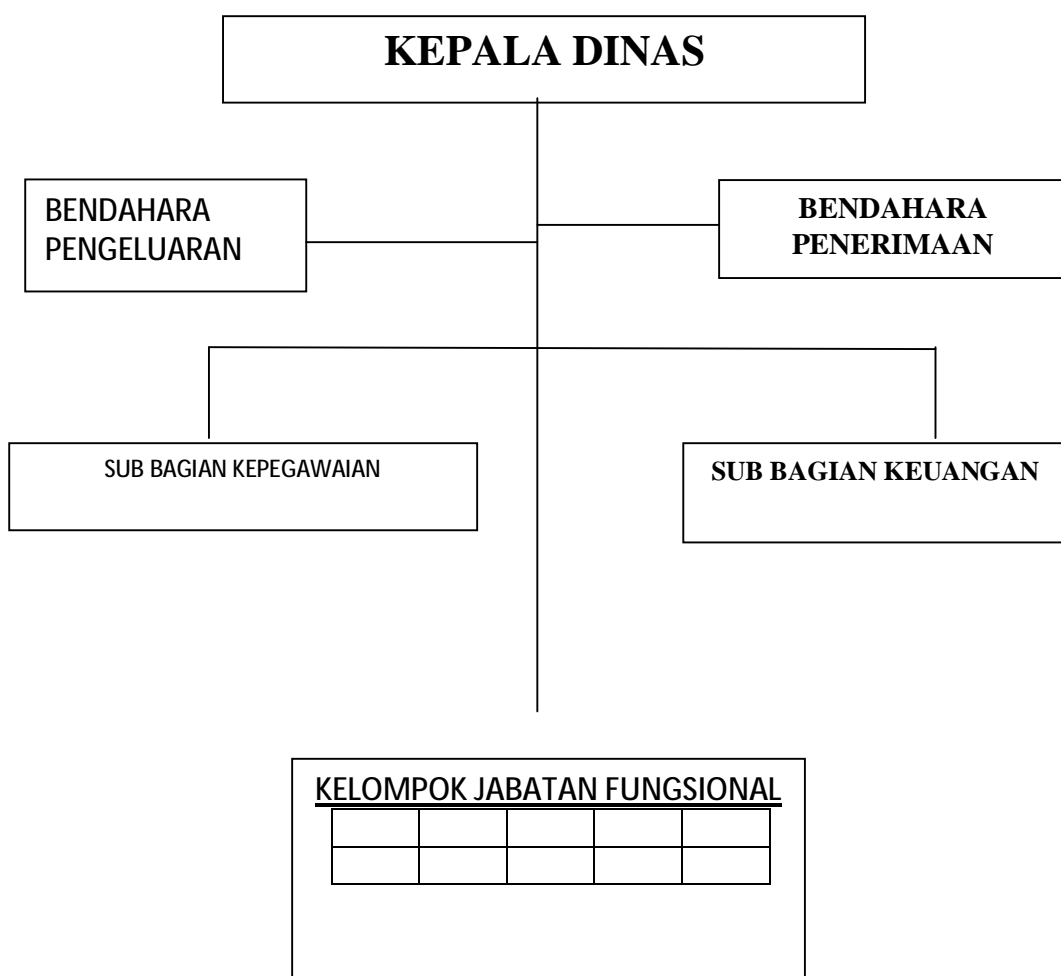
2. Bidang lingkungan hidup Lingkungan hidup merupakan faktor penting penataan ruang. Arah kebijakan di bidang ini dalam rangka penataan ruang adalah terpeliharannya lingkungan hidup, terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan terwujudnya suatu masyarakat yang sadar tentang pentingnya keseimbangan lingkungan.

3. Bidang Pemukiman Bidang ini merupakan bagian dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Arah kebijakan bidang ini yang berhubungan dengan penataan ruang adalah mengupayakan terbangunnya jalan-jalan lingkungan, tertatanya kawasan pemukiman yang rapi dan serasi, meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan.

4. Bidang Tata Ruang. Agar bidang ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat maka arah kebijakannya adalah agar tersedianya dokumen penataan ruang kabupaten, kecamatan dan kawasan-kawasan tertentu yang dinamika pertumbuhannya

cepat, terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta melaksanakan sosialisasi Tata Ruang kepada masyarakat dalam upaya pemahaman dan partisipasi dalam pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman



Sumber: dinas pkerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten

Bener Meriah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa.

Adapun data yang diperoleh yaitu Jumlah Desa Kabupaten Bener Meriah 2017-2018 adalah sebagai berikut .

Tabel 4.1
Jumlah Desa Kabupaten Bener Meriah 2017-2018

NO	Kecamatan	Ibu Kota	LUAS		Jumlah Desa		
			Hektar	%	Definitif	Persiapan	Total
1	Timang Gajah	Lampahan	158,51	10.90	15	25	40
2	Bukit	Simpang Tiga	121,47	8.35	26	14	40
3	Bandar	Pondok Baru	293,43	20.18	29	15	44
4	Syiah Utama	Samar Kilang	560,00	38.51	16	13	29
5	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	140,01	9.63	5	18	23

6	Wih Pesam	Simpang Balik	48,08	3.31	11	14	24
7	Permata	Buntut Kemumu	132,59	9.12	13	14	27
Kab. Bener Meriah		Simpang Tiga Redelong	1.454,09	100,00	115	112	227

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah

Adapun data yang diperoleh yaitu Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2018 antara lain sebagai berikut ::

Tabel 4.2
Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2018:

NO	Nama Barang	Jumlah	Harga (ribuan)
1	Tanah		839,724,000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3938 m ²	779, 724,000,00
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan 2	60 m ²	60,000,000,00
	Alat-alat angkutan		
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Studio Dan Komunikasi		

			614,288,545.00
	Bangunan Gedung	160 M²; 1 Unit	376,449,845.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30 m²; 1 unit	15,184,000.00
	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	16 m²; 1 unit	25,800,000.00
2	Pagar	30 m²; 1 unit	83,063,000.00
	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	60 m²; 1 unit	10,000,000.00
	Paving Block		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Adanya pembangunan infrastruktur sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfahmi, St selaku Plt. Kepala Dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman Daerah Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa pelaksanaan rencana tata ruang wilayah juga dilaksanakan oleh bagian bidang tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satu keahlian yang dimiliki oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan infrastruktur ini yaitu mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang diinginkan .

Dari hasil wawancara dengan bapak Ali Hasan, ST selaku bidang perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman, menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya paham mengenai tugas tersebut. karena tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada pelaksana, maka pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar. pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Bener Meriah, yang memuat

informasi mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten Bener Meriah Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu tidak terlaksananya tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab pihak-pihak pelaksana tidak paham akan tugas mereka masing-masing karena kurangnya pemantauan dan monitoring dari atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusydan, St selaku seksi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka membentuk tim efektif yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada setiap SKPD agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat diakses oleh SKPD yang bersangkutan. namun tim yang telah dibentuk dan tugas yang telah disusun secara individu sesuai dengan kemampuannya, tidak berjalan dengan baik, yang mana seharusnya seluruh Kepala Subbagian, pokja-pokja ULP dan staf pada bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab, bertugas membantu dan membimbing admin SKPD dalam melakukan input data, membantu pelaksanaan acara sosialisasi dan workshop.

melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab, Pembina adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan, pengarah adalah Asisten Ekonomi

Pembangunan, memberikan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu persetujuan dari Kepala SKPD mengenai Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimana setiap SKPD nantinya akan menginput data informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa kesesuaian antara yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai belum sesuai, dimana program pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Bener Meriah bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Bener Meriah yang memuat informasi mengenai perkembangan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun tugas yang diberikan kepada pihak pelaksana pembangunan infrastruktur tidak terlaksana sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sebab pihak yang melaksanakan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya paham mengenai pelaksanaan tersebut. karena tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada pelaksana pembangunan infrastruktur, maka pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar.

b. Adanya pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfahmi, St selaku Plt. kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Bener Meriah, yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya modal adalah salah satu faktor keberhasilan dari sasaran yang ingin dicapai, ditambah dengan adanya komputer sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan tersedianya aplikasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa kabupaten Bener Meriah (Simpang Tiga) sebagai prasarana yaitu suatu usaha penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Setiap sarana yang disediakan dapat digunakan oleh setiap pekerja, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusydan, St selaku seksi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang digunakan. Namun masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada kualitas pada sumber daya manusia dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program Rtrw. Masalah bisa diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan ujian

sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan potensi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Ali Hasan, St selaku bidang perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa tidak adanya sarana yang disediakan untuk terlaksananya kegiatan, kecuali alat elektronik seperti komputer yang selalu tersedia. Namun tidak ada sarana yang disediakan ditengah masyarakat, guna untuk mengakses informasi atau pun memberi pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa bagian pengadaan barang dan jasa setdakab tidak dapat memanfaatkan sumber daya manusia guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang dan jasa setdakab, sebagaimana diketahui adanya jasa dan usaha dari setiap orang atau kelompok dapat membantu terlaksananya kegiatan dengan cepat dan sesuai, kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala terlaksananya program Rtrw. Ditambah lagi kurangnya sarana yang disediakan dapat menghambat terlaksananya Program Rtrw.

c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bapak Alfahmi, St kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Bener Meriah, Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yaitu dengan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memaksimalkan pengawasan ke lapangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali. Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke pembangunan infrastruktur agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat dan yang terlibat dalam pengawasan tersebut adalah kepala dinas, kasi sarana dan prasarana.

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ali Hasan, St selaku bidang perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman Kabupaten Bener Meriah. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah

berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung ke lapangan serta melakukan pembinaan kepada masyarakat agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Pengawasan yang dilakukan harus bekerja sama dengan semua anggota yang bekerja di Dinas Pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman agar pengawasannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Lain halnya menurut saudara setiadi Mirandi selaku masyarakat simpang tiga kabupaten Bener meriah menyatakan program Dinas Pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman belum dijalankan dengan baik, dibuktikan dengan jarang/tidak rutin pengawasan yang dilakukan Dinas tersebut. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman belum sesuai dengan yang diharapkan karena petugas berharap ada perhatian dari dinas agar terus melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur tersebut. Masyarakat juga terlibat di dalam pengawasan pembangunan infrastruktur karena masyarakat juga sebagai penduduk yang berdomisi di simpang tiga Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, menurut bapak Padlianto selaku masyarakat setempat, yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum semaksimal dengan apa yang diinginkan. Pengawasan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman menyatakan masih banyaknya petugas yang lali akan

tanggung jawabnya sehingga pekerjaan yang seharusnya terlaksana dengan baik tidak tepat sasaran.

Menurut Bapak Reza Ariski selaku masyarakat menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik, karena masyarakat merasa terganggu dengan proses yang berbelarut-larut menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat setempat. Dengan begitu masyarakat terlibat di dalam pengawasan program pembangunan infrastruktur karena dengan begitu masyarakat bisa mengadu kepada dinas secara langsung tentang pelayanan yang diberikan sebelumnya tidak semaksimal dengan apa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan program pembangunan infrastruktur.

d. Adanya Pencapaian Hasil Yang Ditetapkan Sesuai Kinerja

Sedangkan menurut bapak Rusydan,St selaku seksi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah, menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena program tersebut belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang mengeluh. Dalam pencapaian target dilakukan dengan cara memperluas pembangunan

infrastruktur dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat agar terwujud infrastruktur yang tertib sehingga mampu memberikan sumbangan kepada PAD.

Lain halnya dengan bapak Alfahmi, St selaku plt. Kepala Dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur belum mencapai target yang diinginkan, sarana tempat pasar kurang memadai, dan fasilitas yang minim. Faktor penghambat target yaitu kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Selain itu, menurut bapak Reza Ariski selaku masyarakat simpang tigamenyatakan bahwa pencapaian hasil yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena program Rtrw belum mencapai target, pembangunan infrastruktur yang sempit, peran masyarakat sangat berpengaruh dengan pembangunan infrastruktur karena merupakan kewajiban masyarakat setempat guna untuk menggunakan fasilitas yang semestinya. Faktor penghambatnya kuranya fasilitas pembangunan infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari saudara Setiadi Miranda, menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena program Rtrw belum mencapai target yang diinginkan, dan sarana dan prasarana tempat yang kurang memadai. Adapun yang menjadi faktor penghambat

tercapainya target yaitu kurang tertibnya dan ketidaknyamanan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Padlianto selaku masyarakat, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman untuk meningkatkan target belum berjalan dengan baik sehingga targetnya belum tercapai. Faktor penghambat yaitu kurangnya kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan infrastruktur yang kurang memadai ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena program Rtrw belum mencapai target karena pihak dinas belum maksimal melakukan perbaikan fasilitas tempat tempat umum dan menambah luas pembangunan di berbagai tempat.

A. Pembahasan

a. 1. Adanya pembangunan infrastruktur sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan daerah.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai tidak sesuai. Dimana tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan setiap pelaksana kegiatan, tugas tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada setiap pihak pelaksana program rtrw, seharusnya yang melaksanakan program rtrw paham mengenai tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, agar yang menjadi tujuan dapat

terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.

Karena tidak adanya kompetensi yang dimiliki oleh pihak yang melaksanakan tugas, maka tugas yang diberikan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak tersebut, kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Sebab kurangnya pelatihan dalam mendukung tugas yang diberikan. Sedangkan yang diharapkan, bahwa setiap pelaksana program pembangunan infrastruktur guna untuk selalu memberikan ide atau masukan ketika saat mengadakan pertemuan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dalam menempatkan tugas dengan latar belakang pendidikan setiap pihak pelaksana kegiatan tersebut, pelatihan yang meningkatkan kemampuan serta pemahaman pelaksana program pembangunan infrastruktur dalam menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu nara sumber yaitu bapak Ali Hasan, ST selaku bidang perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman menyatakan bahwa program pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Bener Meriah, yang memuat informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten . Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu tidak terlaksananya tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab pihak-pihak pelaksana tidak paham akan tugas mereka masing-masing karena tidak adanya pemantauan dan monitoring oleh atasan kepada setiap pihak-pihak pelaksana pembangunan infrastruktur.

2.Pemanfaatan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Hafidz (1989 dalam Susilo, 2007:185) memberikan pengertian pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana adalah pemanfaatan atau pendayagunaan jasa/usaha dan berbagai peralatan, perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan.

Berdasarkan teori tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah dalam melaksanakan program Rtrw, tidak dapat memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, sebagaimana diketahui bahwa SDM yang terlibat di bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Pejabat Pengadaan maupun Kelompok Kerja Pengadaan Unit Layanan Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Oleh sebab itu masalah ini dapat diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan Ujian , Pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi lainnya dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program simbaja, dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam melaksanakan suatu kegiatan, karena apabila kedua hal ini tidak

tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber dengan bapak Anhar Adly selaku seksi pembinaan dan pengawasan bangunan Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang dapat digunakan. Namun karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang RTRW pemerintah, sehingga membuat program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak ada kualitas pada sumber daya manusia dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program RTRW. Masalah tersebut bisa diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan potensi lainnya.

3. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Qanun Nomor 19 Tahun 2005 Tentang rencana tata ruang wilayah Dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan

kenyamanan adanya pembangunan infrastruktur di daerah Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas pekerjaan umum sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

4. Adanya Pencapaian Hasil Yang Ditetapkan Sesuai Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Rangka Penataan Tata Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah, dengan adanya pencapaian hasil yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya masyarakat mengeluh yang memakai sarana pembangunan infrastruktur yang terjadi. adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dilakukannya sosialisasi pembinaan untuk mengetahui keluhan masyarakat tersebut, didalam pencapaian hasil ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Dimana target tersebut berupa banyaknya tempat tersedia sarana dan prasana masyarakat.

Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring. Hal ini sesuai dengan pendapat Weimer (2005 : 44) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan,

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan. Adanya pencapaian hasil yang dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Di Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian hasil yang di tetapkan sesuai kinerja belum berjalan dengan baik karena masih terdengar bahwa masyarakat menilai ketidak puasan terhadap kinerja yang berjalan, serta kurangnya tempat sarana infrasruktur yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Qanun No.13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan ruang kota simpang tiga kabupaten bener meriah belum terlaksana berdasarkan Qanun yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan, terkait dengan pembangunan infrastruktur, sebagian dari masyarakat mengeluh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang ini masi belum layak digunakan dan membuat masyarakat tidak nyaman akan pembangunan yang tidak layak berada ditengah kehidupan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan, terminal dan pasar menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur yang memadai akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mecapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

Diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan, terlaksana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, pembangunan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat tidak merasa terganggu dan nyaman terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun kondisi pasar yang memadai.

B.Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang administrasi Pemerintahan, pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah harus membentuk instansi -instansi pemerintahan yang berwenang dalam melaksanakan penataan ruang dan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bener Meriah
2. Sebaiknya pemerintah melakukan peningkatan dalam hal pembangunan seperti jalan, terminal dan pasar untuk memudahkan dan mempercepat aktivitas masyarakat.
3. Seharusnya pemerintah lebih melakukan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah ibu kota simpang tiga kabupaten Bener Meriah.
4. Sebaiknya Pemerintah Melakukan pemantauan terhadap SKPD untuk data perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
5. Seharusnya pemerintah mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan potensi lainnya.
6. Seharusnya pemerintah memiliki perhatian lebih dalam menempatkan tugas dengan latar belakang pendidikan setiap pihak pelaksana kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriaji,S.2013. Evaluasi Penggunaan Tanah terhadap rencana tata ruang wilayah (Study kasus:Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Karanganyar,Jawa Tengah).skripsi.Yogyakarta:Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada.

Hardjasoemantri, Koesnadi., 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada, University Press, Bandung.Tarigan, Robinson., 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara

Asdak,C.,Salim,H.2006.*daya dukung SDA sebagai pertimbangan penataan ruang* .Jurnal teknik lingkungan P3TL-BPPT.7.(1):16-25

Muta'Ali,L.2013 penataan ruang wilayah dan kota.yogyakarta: badan penerbit fakultas geografi

Cataneesey,Anthony J., dan jamse C.S.1979. *Perencanaan kota*.120

Sujud,1990.*Ejournal administrasi negara*. Volume 4,no1,2016.2.2592-2604

Marangkayu. *Ejournal administrasi negara*, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, volume 4 , nomor 1, 2016:2592-2604

Undang-Undang

Undang-undang RI No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
Sri Hadiati, SH, MBA, Perkembangan Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah.

Undang-undang No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang.